

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini penulis akan menyajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Dalam bagian ini pula akan disajikan sebagai berikut, pada bagian pertama yaitu tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menggambarkan konsep dasar mengenai variabel yang diteliti, dan yang kedua yaitu diikuti dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai kerangka pemikiran tentang model variabel, yang nantinya disertai dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya suatu perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2011) adalah peningkatan output produksi barang dan jasa pada sebuah negara seperti pengembangan infrastruktur, penambahan jumlah produksi barang industri, penambahan produksi sector jasa dan penambahan produksi barang modal. Sementara menurut KBBI pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan produk nasional bruto. Dalam konteks ekonomi, Produk Nasional Bruto (PNB) adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi

pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin besar pula kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Dumairy (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah bentuk kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa melihat seberapa besarnya kenaikan yang terjadi tersebut apakah lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, juga tidak melihat apakah ada perubahan dari struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melesat secara berkelanjutan akan sangat memungkinkan untuk negara dalam hal memajukan dan memakmurkan masyarakatnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam hal menilai kinerja pada suatu perekonomian, terkhusus dalam hal analisis hasil pembangunan ekonomi yang sudah dilakukan oleh negara atau oleh suatu daerah. Ekonomi dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi barang dan jasanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan seberapa jauh aktivitas perekonomian bisa menghasilkan surplus pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam waktu tertentu.

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli

Dari penjelasan di atas mengenai pertumbuhan ekonomi, selanjutnya peneliti akan membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai penjelasan mengenai faktor - faktor yang dapat menentukan kenaikan output per kapita dalam waktu yang panjang, dan penjelasan

mengenai bagaimana mekanisme faktor-faktor tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain sehingga terbentuk sebuah proses. Maka secara sederhana teori ekonomi adalah suatu cerita atas dasar keterkaitan antar faktor ekonomi mengenai bagaimana pertumbuhan bisa terjadi. Sukirno (2006) berpendapat bahwa teori pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi tiga, antara lain yaitu teori pertumbuhan klasik, teori Harrod-Domar dan teori pertumbuhan klasik.

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut teori Adam Smith, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang dipergunakan. Adam Smith menitikberatkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada pertumbuhan penduduk. Pada mulanya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relative lebih, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi, maka para pelaku ekonomi akan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini akan membuahkan investasi baru dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Tetapi hal tersebut tidak akan sempurna tanpa adanya pendukung tambahan yaitu tenaga kerja. Karena pada konsep dasar pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika terdapat kesinambungan antara akumulasi modal dan juga produktivitas tenaga kerja. Sebuah perekonomian dapat mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah, jika keadaan ini dicapai, secara tidak langsung ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang. Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup.

Menurut teori ini, setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut disebut juga dengan teori penduduk optimum. Menurut teori ini jumlah penduduk yang terus bertambah akan menimbulkan jumlah penduduk yang tertentu, terkhusus pada produksi marjinal yang telah berhasil sama dengan pendapatan per kapita. Pada kondisi ini juga pendapatan per kapita mencapai nilai yang maksimum. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan dengan penduduk optimum (Adriyan, 2017).

2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Pengembangan teori pertumbuhan Harrod-Domar dikembangkan hampir berbarengan dengan Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan E. D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Kedua ahli ekonomi tersebut menggunakan proses perhitungan yang berbeda, akan tetapi membuahkan hasil yang cenderung sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang serupa dan disebut teori Harrod-Domar yang melihat pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Harrod-Domar mendasarkan teorinya pada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi hasil akhirnya menunjukkan pemerintah perlu mencanangkan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam hal penawaran dan permintaan barang.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi juga didasarkan pada komposisi utang luar negeri yang terjadi di negara berkembang yang disebabkan oleh kurangnya tabungan dalam negeri dalam membiayai pembangunan nasional. Dalam teori ini dijelaskan bahwa angka pertumbuhan diperoleh dengan membagi tabungan dalam negeri dengan Rasio Capital Output (ICOR). Jika jumlah tabungan dalam negeri tidak memenuhi proyeksi angka pertumbuhan, maka solusi untuk menutupi defisit menggunakan utang luar negeri (Williamson & Sachs, 1985).

3. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan ini meninjau dari sisi pandang yang berbeda dari teori Harrod-Domar, yaitu melihat dari segi penawaran. Berdasarkan teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovis dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Menurut analisa Solow, faktor penting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah penambahan modal dan tenaga kerja, serta faktor yang penting juga yaitu peningkatan teknologi dan kemajuan kapasitas serta kapabilitas tenaga kerja.

Menurut (Febriana, 2011) bagian terpenting dari teori pertumbuhan Neo-Klasik bukanlah dalam menunjukan faktor faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sumbangsi untuk menggunakan teori ini dengan mengadakan penyelidikan empiris dan menentukan peran sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Abramovis dan Solow mengemukakan bahwa yang menjadi penyebab penting pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yaitu perkembangan teknologinya.

Kemudian setelah itu beberapa pakar ekonomi lain juga melakukan penyelidikan mengenai hal yang serupa, salah satunya yang terkenal yaitu yang dilakukan oleh Deninson yang menganalisis faktor yang mengakibatkan perkembangan di negara maju di antara tahun 1950 sampai tahun 1962. Dan hasilnya menunjukkan bahwa bukan modal, tetapi teknologi dan perkembangan keterampilan yang menjadi faktor utama yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.2 Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi mengukur pertambahan pendapatan nasional rill, yaitu pendapatan nasional yang dihitung pada harga yang konstan. Kenaikan pendapatan nasional rill ini berarti barang barang dan jasa dihasilkan oleh suatu negara yang telah meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tony S. Chendrawan, 2017). Jumlah kenaikan yang berlaku, jika dibandingkan dengan pendapatan nasional rill pada tahun sebelumnya, menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi dalam tahun tertentu dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$g_t = \frac{Y_t^r - Y_{t-1}^r}{Y_{t-1}^r} \times 100$$

Dimana g_t adalah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t yang dinyatakan dalam persen, Y_t^r adalah pendapatan nasional rill pada tahun t dan Y_{t-1}^r

adalah pendapatan nasional rill pada tahun sebelumnya. Pendapatan nasional yang dimaksud disini adalah produk domestik bruto atau produk nasional bruto.

2.1.1.3 Gross Domestic Product (GDP)

Menurut Rudgriger (2006), GDP adalah pengukuran nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang ada dalam negara selama periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk menganalisa perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada saat, jadi GDP/PDB ini dapat menjadi pencerminan dari kinerja ekonomi di negara tersebut.

Produk domestik bruto merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam waktu tertentu. Dalam analisis makro selalu digunakan istilah “pendapatan nasional” dan biasanya istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan nilai suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara (Sukirno, 2015).

Menurut Arifin dan Gina (2009) indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah tingkat produk domestik bruto. PDB dapat mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara, semakin tinggi PDB suatu negara maka dapat dikatakan semakin bagus pula kinerja ekonomi di negara tersebut. Berikut beberapa alasan digunakannya PDB sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini

menyebabkan peningkatan PDB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

2. PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran (*circular flow concept*) yaitu perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup perhitungan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung PDB memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah output pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDB adalah negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik.

2.1.2 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut Syahrani (2011) penanaman modal dalam negeri merupakan bagian dari penggunaan kekayaan yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik sendiri atau secara tidak langsung, antara lain melalui obligasi, saham, deposito, dan tabungan yang jangka waktu minimal satu tahun. Menurut Undang-Undang nomor 6 pasal 1 tahun 1968, perusahaan yang dapat menggunakan modal dalam negeri dapat dibedakan menjadi dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan nasional dan perusahaan asing. Dalam Undang - Undang no 6 tahun 1968 dan Undang - Undang nomor 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri, disebutkan terlebih dahulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu, sebagai berikut:

1. Undang-Undang ini dengan “modal dalam negeri” adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.
2. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, yang dimaksud dalam Undang - Undang ini dengan “Penanaman Modal Dalam Negeri” adalah penggunaan daripada kekayaan seperti dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan ketentuan Undang-Undang ini.

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*. Penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestik untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan tidak dilakukan secara langsung untuk membangun usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia

yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Syahrani, 2011)

Pihak yang dapat menjadi penanam modal dalam negeri adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal diantaranya adalah orang perorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, badan hukum Indonesia. Pihak yang dapat mengajukan permohonan modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri diantaranya yaitu Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma (Fa), badan usaha koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perorangan.

2.1.2.1 Tujuan dan Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri

Menurut Salim dan Budi (2008) ada beberapa tujuan dari diselenggarakannya penanaman modal dalam negeri diantaranya yaitu sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya yang rendah, manfaat pajak lokal, kemudian untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan perusahaan lain, untuk mendapatkan return yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

Menurut Sutratman (2009) manfaat penanaman modal dalam negeri terdiri dari empat bagian yaitu penanaman modal dalam negeri mampu menghemat devisa, kemudian mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan ke belakang, serta mampu memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

2.1.3 Penanaman Modal Asing (PMA)

PMA atau investasi asing merupakan investasi yang dilakukan oleh para pemilik modal asing didalam negeri untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilakukan. Menurut Jhingan, pemasukan modal asing sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing sangat membantu dalam industrialisasi, dalam membangun modal ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih luas. Modal asing tidak hanya membawa uang dan mesin, tetapi juga keterampilan teknik. Ia membuka daerah-daerah terpencil dan menggarap sumber-sumber baru yang belum dimanfaatkan (Nurana, 2016).

Menurut Undang-Undang no 1 tahun 1967 dan Undang-Undang no 11 tahun 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah penanaman modal secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut, sedangkan pengertian modal asing antara lain:

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.

3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperbolehkan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri (Suryato, 2003), menjelaskan bahwa PMA terdiri atas:

1. Invertasi portofolio (*portofolio investment*), yaitu investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didominasi atau ternilai dari mata uang nasional. Kegiatan investasi portopolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiunan, dan sebagainya.
2. Investasi asing langsung (*Foreign direct investment*), yaitu PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi dan sebagainya.

2.1.4. Tenaga Kerja

2.1.4.1 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atas jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dan merupakan modal bagi bergeraknya perekonomian negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 pasal 3 ayat 2, yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas).

Beberapa konsep ketenagakerjaan yang berlaku secara umum menurut (Pattimahu, 2015):

1. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun ke atas) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
2. Angkatan kerja (*labour force*) adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa, maka yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu bekerja (K) dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan (MP). Angkatan kerja yang masuk kategori bekerja apabila

minimum bekerja selama 1 jam selama seminggu lalu untuk kegiatan produktif sebelum pencacahan dilakukan. Mencari pekerjaan adalah seseorang yang kegiatan utamanya sedang mencari pekerjaan dan belum bekerja minimal 1 jam selama seminggu yang lalu. Penjumlahan angka angkatan kerja dalam bahasa ekonomi disebut sebagai penawaran angkatan kerja (*labour supply*). Sedangkan penduduk yang berstatus sebagai pekerja atau tenaga kerja termasuk ke dalam sisi permintaan (*labour demand*).

3. Bukan angkatan kerja (*unlabour force*) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, namun kegiatan utama selama seminggu yang lalu adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Apabila seseorang yang sekolah, mereka ingin bekerja minimal 1 jam selama minggu yang lalu, tetapi kegiatan utamanya adalah sekolah, maka individu tersebut tetap termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Mereka tercatat lainnya jumlahnya tidak sedikit dan mungkin sebagian besar masuk ke dalam transisi antara sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dalam kategori bukan angkatan kerja (BAK).
4. Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labour force participation rate*) adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut, yaitu membandingkan angkatan kerja dengan tenaga kerja.

Tingkat pengangguran (*unemployment rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja sedang aktif mencari

pekerjaan, yaitu membandingkan jumlah orang yang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan (*demand*) dan lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam masyarakat. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian dan tingkat upah. Besar penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat *employment*) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah.

2.1.4.2 Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat baik yang telah ditempati maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong (permintaan tenaga kerja). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja, kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada. Oleh karena itu, perluasan kesempatan kerja merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerja baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.

2.1.4.3 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah terserapnya tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerjaan (lapangan pekerjaan) untuk diisi oleh para pencari kerja.

Menurut menurut Todaro dan Smith (2003) penyerapan tenaga kerja merupakan penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas pekerjaan atau suatu

keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari pekerjaan. Secara umum penyerapan tenaga kerja tersebut menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Menurut Kuncoro (2002) penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan pekerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Permintaan tenaga kerja secara umum merupakan jumlah orang yang dibutuhkan untuk bekerja dalam suatu perusahaan maupun dalam proses produksi. Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja secara umum menunjukkan besarnya kemampuan suatu perusahaan menyerap sejumlah tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja besarnya tidak sama antara sektor satu dengan sektor yang lain (Sumarsono, 2003).

Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor, namun tiap sektor mengalami pertumbuhan dan berbeda demikian juga tiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal, yaitu:

- a. Terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja masing-masing sektor.

- b. Secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap pendapat nasional.

2.1.4.4 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Menurut Sumarsono (2003) elastisitas merupakan ukuran derajat kepekaan jumlah permintaan akan sesuatu terhadap perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dalam ilmu ekonomi elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Besar kecilnya elastisitas permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memungkinkan substitusi tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor produksi lainnya, elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan dan elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya. Semakin kecil permintaan akan sesuatu dapat berupa barang, tenaga kerja, produksi dan lain-lain. Besarnya permintaan akan barang, tenaga kerja, produksi dapat dipengaruhi oleh sesuatu faktor penentu misalnya harga, produksi, upah, modal dan lain-lain.

1. Elastisitas Permintaan

Elastisitas permintaan (*elasticity of demand*) adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sedangkan besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam

koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disingkat E, yang dinyatakan dengan rumus berikut ini:

$$Ed = \frac{\Delta Q}{\Delta P} = \frac{P}{Q} \text{ atau } Ed = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P}$$

Keterangan:

ΔQ = perubahan jumlah permintaan

ΔP = perubahan harga barang

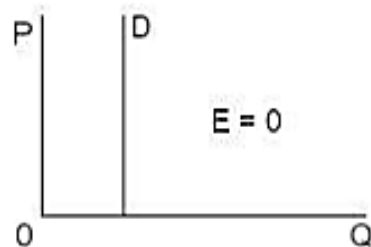
P = harga mula-mula

Q = jumlah permintaan mula-mula

Ed = elastisitas permintaan

Berdasarkan besar kecilnya tingkat koefisien elastisitas permintaannya, elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu:

a. Permintaan Inelastis Sempurna ($Ed = 0$)



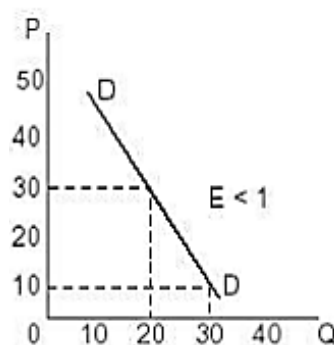
Gambar 2.1 Kurva Permintaan Inelastis Sempurna

Sumber: Sukirno, 2003

Permintaan inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang diminta meskipun ada perubahan harga, atau $\Delta Q_d = 0$, meskipun ΔP ada. Secara matematis $\% \Delta Q_d = 0$, berapapun $\% \Delta P$. Dengan kata lain perubahan harga sebesar apapun sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Kasus permintaan inelastis sempurna terjadi bila konsumen dalam dalam membeli barang

tidak lagi memperhatikan harganya, melainkan lebih memperhatikan pada seberapa besar kebutuhannya. Contoh: pembelian garam dapur oleh suatu keluarga atau pembelian obat ketika sakit. Konsumen membeli garam atau obat lebih mempertimbangkan berat butuhnya, bukan pada berat harganya.

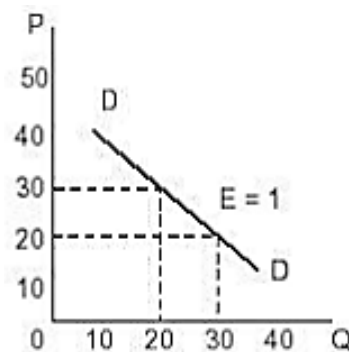
b. Permintaan Inelastis ($E_d < 1$)



Gambar 2. 2 Kurva Permintaan Inelastis
Sumber: Sukirno, 2003

Permintaan inelastis terjadi jika perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain kalau presentasi perubahan jumlah yang diminta relatif lebih kecil dibanding presentasi perubahan harga. Secara matematis $\% \Delta Q_d < \% \Delta P$. Permintaan inelastis atau sering disebut permintaan yang tidak peka terhadap harga, misal harga berubah naik 10% maka perubahan permintaannya akan turun kurang dari 10%. Elastisitas permintaan kurang dari satu biasanya terjadi pada barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, pupuk, bahan bakar dan lain-lain.

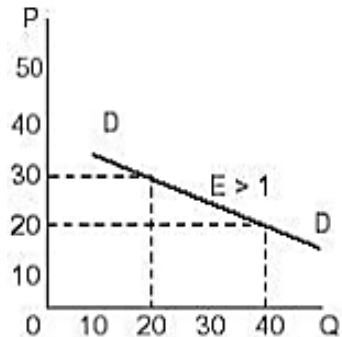
c. Permintaan Elastis Uniter ($E_d = 1$)



Gambar 2.3 Kurva Permintaan Elastis Uniter

Sumber: Sukirno, 2003

Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain presentasi perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Jadi jika harga berubah turun sebesar 10% maka kuantitas yang diminta juga akan berubah dalam hal ini akan naik sebesar 10%. Secara matematis $\% \Delta Q_d = \% \Delta P$. Permintaan yang elastis uniter atau elastis proporsional atau yang E_d tepat = 1 sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun terjadi sebenarnya hanyalah secara kebetulan.

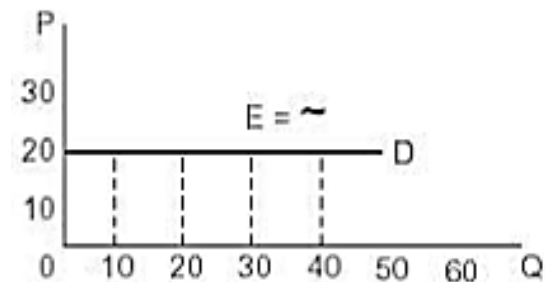
d. Permintaan Elastis ($E_d > 1$)

Gambar 2.4 Kurva Permintaan Elastis

Sumber: Sukirno, 2003

Permintaan elastis terjadi ketika perubahan harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain persentase perubahan jumlah yang diminta relatif lebih besar dari persentase perubahan harga. Jadi jika harga turun 10%, maka kuantitas barang yang diminta akan mengalami kenaikan lebih dari 10%. Secara matematis $\% \Delta Q_d > \% \Delta P$. Permintaan yang elastis atau peka terhadap harga ($E_d > 1$) dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terjadi pada barang-barang mewah, seperti mobil, alat-alat elektronik, pakaian pesta dan lain-lain.

e. Permintaan Elastis Sempurna ($E_d = \infty$)



Gambar 2.5 Kurva Permintaan Elastis Sempurna

Sumber: Sukirno, 2003

Permintaan elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang diminta meskipun tidak ada perubahan harga atau $\Delta Q_d = \text{ada perubahan}$, meskipun $\Delta P = 0$ (tidak ada perubahan harga). Secara matematis $\% \Delta Q_d = \text{Ada}$, $\% \Delta P = 0$. Kasus permintaan elastis sempurna terjadi apabila permintaan suatu barang dapat berubah-ubah meskipun harga barang tersebut tetap. Contoh kasus ini bisa terjadi pada berbagai produk, yang jelas kalau permintaan akan produk tersebut bisa berubah-ubah walaupun harga produk itu tetap.

2.1.4 Belanja Negara

Pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang semakin penting perannya dalam perekonomian modern. Aktivitas ekonomi yang dilakukan pemerintah ditunjukkan untuk perubahan struktur ekonomi oleh kebijakan fiskal melalui penetapan rencana anggaran penerimaan dan belanja negara. Secara teoritis pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat akan mendorong meningkatnya pendapatan perkapita yang semakin besar dari tahun ketahun. Peningkatan ini ditandai dengan naiknya

produk domestik bruto melalui bekerjanya efek pengganda. Pada gilirannya peningkatan Produk Domestik Bruto akan mempengaruhi besarnya penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak, baik langsung maupun tidak. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu berapa besar pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Mutia, 2016).

Belanja negara yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional (Sukirno, 2000). Belanja negara atau pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesubroto, 2008).

Fungsi belanja negara menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah:

1. Fungsi otorisasi, yaitu anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan, yaitu anggaran menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
3. Fungsi pengawasan, yaitu anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Fungsi alokasi, yaitu anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah telah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Tujuan penyusunan belanja negara adalah sebagai pedoman pengeluaran negara bagi pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatan dan kebijakan pemerintahan. Anggaran negara yang disusun dengan tepat akan mendorong tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah setiap tahunnya mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya untuk dibahas bersama DPR. Jika disetujui maka RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) APBN yang akan berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran. Apabila RUU APBN tidak disetujui DPR, maka Pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar nilai APBN pada tahun anggaran yang sebelumnya. Dalam menyusun rancangan APBN pemerintah berpedoman pada rencana kerja yang disusun untuk mendorong tercapainya tujuan

bernegara. Dalam rangka penyusunan APBN, menteri/pimpinan pada kementerian/lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Dalam rencana kerja dan anggaran terdapat estimasi belanja untuk tahun berikutnya dan disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang belanja negara tahun berikutnya. Sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran negara harus dilakukan dengan cermat dan sistematis agar fungsi belanja negara dapat berjalan dengan optimal. Kebijakan anggaran di Indonesia yang berupa belanja negara bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Namun dalam perkembangannya, kebijakan anggaran yang sudah ditetapkan tetap tidak terlepas dari situasi perekonomian di Indonesia dan berbagai faktor eksternal yang tidak pasti dan sulit diprediksi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengenai “Pengaruh PMDN, PMA, Tenaga Kerja, dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000-2021”.

Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shem Dwi Nehemia, Ferry Prasetya, 2023. Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia.	Pertumbuhan Ekonomi, PMDN, PMA.		Penanaman modal dalam negeri dan modal asing berbanding lurus dengan indeks pertumbuhan inklusif. Infrastruktur menjadi salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	<i>Jurnal of Develofment Economic and Social Studies</i> , Vol.2 No. 1 ,2023
2.	Siska Anggraini Putri, Hendry Cahyo, 2012. Pengaruh Belanja Negara dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.	Pertumbuhan Ekonomi, PMDN, Belanja Negara.		Melalui uji F terlihat hasil uji F diperoleh nilai probablitas untuk F sebesar $0.043984 < 0.05$. Sehingga belanja daerah dan PMDN berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.	Jurnal Pendidikan Ekonomi Unesa, Vol.2 No. 1, 2012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Etri Rizki Yuliantari, 2016. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Belanja Langsung, serta Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Pertumbuhan Ekonomi, PMDN, PMA. Tenaga Kerja.	Pengeluaran Pemerintah.	PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Tenagakerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.	Jurnal Ekonomi Mulawarman, Vol. 1 No. 1 2016
4.	Febriana Rizki Syahrani, 2011. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1985-2009.	Pertumbuhan Ekonomi, PMDN, PMA.	Utang Luar Negeri.	Penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal asing memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	<i>E-Jurnal of University Islam Negeri Syarif Hidayatullah.</i> 2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Amir Salim, Anggun Purnamasari, 2021. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.	Pertumbuhan Ekonomi,	Inflasi.	Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.	Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 7 No.1. Agustus 2021
6.	Mutia Sari, Mohd. Nur Syechalad, Sabri Abd. Majid, 2016. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.	Investasi, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi.		Investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta secara bersama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.	Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 2, November 2018
7.	Slamet Widodo, Dahiri, 2015. Analisis Pengaruh Belanja Negara Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi.	Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Negara.	Inflasi,	Hubungan yang signifikan antara belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi.	Jurnal Budget, 2015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Yusra Mahzalena, Hijri Juliansyah, 2019. Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah	Inflasi, Ekspor	Pengeluaran Pemerintah memiliki korelasi positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama priode penelitian.	Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Vol. 2 No. 1. April 2022
9.	Yulia Dwi Kartika, Johni Paul Karolius Pasaribu, 2023. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2013-2021.	Pertumbuhan Ekonomi,	Inflasi.	Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 sampai 2021.	Jurnal Ilmiah FEB, Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Januari 2023.
10.	Fitri Murniawati, Irdham Achmad, Ivan Yulivan, 2021. Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing.	Utang Luar Negeri.	Penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dimana 1 persen penanaman modal asing akan menurunkan ekonomi sebesar 5,8258 persen.	Jurnal Ekonomi Pertahanan, Vol. 7 No. 2, 2021.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Josina Wattimena, 2013. Prinsip Prinsip Penanaman Modal Asing dan Implementasinya Pada Masyarakat Hukum Adat.	Penanaman Modal Asing.	Masyarakat Hukum Adat.	Masuknya penanaman modal asing di Indonesia sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Eksistensi masyarakat hukum harus dimarginalkan atau bahkan disingkirkan ketika berhadapan dengan pengusaha.	E-Jurnal, Faculty of Law Pattimura University, 2013.
12.	Nyimas Artina, 2022. Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia, Remitansi, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.	Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja.	Inflasi	Tenaga kerja Indonesia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhane konomi. Remitansi memiliki pengaruh yang positif dansignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Universitas Multi Data Pemasang, Maret 2022.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Yoga Purbaya, 2018. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau	Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja.		Pengaruh investasi positif tetapi tidak signifikan dengan nilai t hitung 1,072869 terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.	Jurnal FEB Universitas Riau, Vol. 2 No. 2 2018
14.	Diyah Arini Rudiningtyas, 2010. Pengaruh Pendapatan dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Negara.	Kemiskinan, Penangguran, Pendapatan Negara.	Belanja negara tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pada tahun 2004-2008 terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Ekonomi Unisma, 2010

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep yang dipergunakan serta memiliki fungsi sebagai pengorganisir serta menghubungkan berbagai ide, teori, fakta, observasi dan kajian literatur dalam sebuah tulisan atau penelitian. Berikut penulis akan menyajikan kerangka pemikiran penelitian yang berjudul “Pengaruh PMDN, PMA, Tenaga Kerja, dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000-2021”.

Dalam teori Harrod-Domar, untuk menumbuhkan suatu perekonomian diperlukan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal

tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.

Menurut Fazriana (2011), penanaman modal dalam negeri merupakan sebuah bagian dari penggunaan kekayaan yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik perorangan atau secara tidak langsung, diantaranya melalui pembelian berupa obligasi, saham, deposito, serta tabungan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun.

Berdasarkan penelitian dari Danu Winonto (2010) menjelaskan bahwa PMDN berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan nilai koefisien 0,995956. Artinya, jika PMDN naik 1% akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun sebesar 0,995965. Sedangkan dalam jangka panjang PMDN berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, dengan nilai koefisien sebesar 0,000212. Artinya PMDN dalam jangka panjang mempunyai pengaruh yang tidak terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fazriana (2011), menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hal ini berarti jika penanaman modal dalam negeri naik 1 persen, maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,462474 persen. Jadi adanya kenaikan penanaman modal dalam negeri akan menyebabkan pertumbuhan

ekonomi meningkat. Investasi domestik atau penanaman modal dalam negeri merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara khususnya Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonominya guna mengurangi konsumsi masyarakat terhadap produk produk asing yang dapat mengakibatkan pengurangan tingkat tabungan yang tercipta pada waktu yang mendatang.

Secara teori, korelasi antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, yaitu pengembangan dari teori Keynes, yang menitikberatkan pada peranan tabungan dan investasi dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak tabungan dan diinvestasikan, maka semakin cepat perekonomian akan tumbuh. Pada dasarnya, masuknya investasi asing yang berasal dari negara lain memberikan peluang tersendiri bagi negara berkembang dalam menunjang suatu pembangunan. Hal ini jelas sangat dibutuhkan, mengingat terbatasnya sumber dana yang tersedia di negara berkembang, sementara kebutuhan keuangan mereka sangatlah besar. Sehingga investasi asing tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi (Arif Nurhidayat, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Dzul Apal Mangun Madin tentang “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan”, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Penelitian dari Musleh yang berjudul “ Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Negara Muslim Tahun 2004-2005 ”, dihasilkan bahwa PMA mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan. Dengan nilai koefisien sebesar $-0,000495$, artinya setiap kenaikan 1 Juta USD PMA, maka pertumbuhan ekonomi di negara – negara muslim mengalami penurunan sebesar $0,000495$ %.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Al Mauludi (2018) tentang pengaruh utang luar negeri dan penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata utang luar negeri dan penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi Robert Solow menyatakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika terdapat keselarasan antara akumulasi modal dan efektifitas tenaga kerja (Sukirno, 2001: 456). Semakin besar angkatan kerja, yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi maka semakin besar pula pendapatan (Todaro,2006:118). Berdasarkan data Susenas BPS, jumlah angkatan kerja yang bekerja di Indonesia kurang dari 95%, hal ini mengindikasikan bahwa Angkatan kerja yang ada di Indonesia belum terserap secara maksimal. Masih kurangnya keterserapan angkatan kerja di Indonesia bisa juga terjadi akibat adanya permasalahan sosial dan keterbelakangan serta juga dari kualitas angkatan kerja itu sendiri dilihat dari skill dan latar belakang pendidikan. Hasil penelitian Ardyan dan

Mulyo (2012) menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel tenaga kerja yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian Citra Ayu, (2014) untuk variabel jumlah tenaga kerja, dari hasil perhitungan dengan regresi model *fixed effect* diperoleh nilai koefisien regresi parsial sebesar $8.31e-08$, nilai t_{hitung} sebesar 3.44 dan nilai $(p>|t|)$ sebesar 0,002. Karena nilai $(p>|t|) < \alpha$, maka dapat diartikan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian Sodik (2007) dengan menggunakan data panel 26 provinsi di Indonesia periode pengamatan 1993-2003 yang menunjukkan bahwa tenaga kerja dilihat dari proxy angkatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

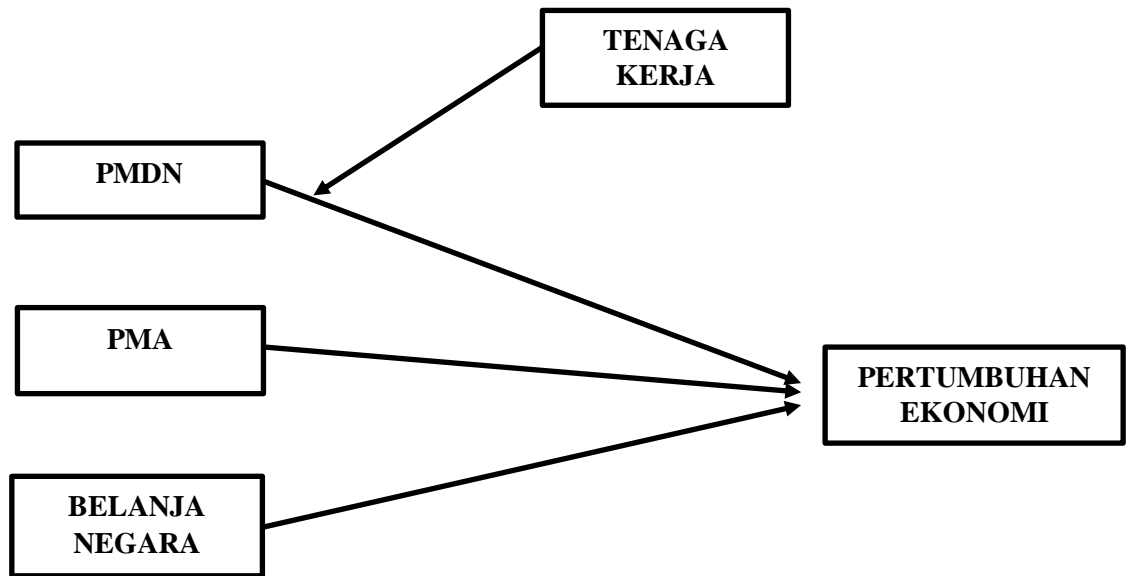
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Artina, (2022) bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (T.Zulham, et.al,2021) mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya segala sesuatu yang terjadi terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tenaga kerja Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan teori Keynesian yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pengeluaran pemerintah melalui belanja negara. Dalam hal ini pemerintah dapat meningkatkan belanja pada sektor yang dianggap strategis seperti halnya infrastruktur, pendidikan, dan

kesehatan. Dengan cara seperti itu, maka akan ada sebuah peningkatan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut penelitian (Mutia, 2016) menunjukkan hasil koefisien estimasi pengeluaran pemerintah sebesar 0,563 artinya setiap kenaikan 1 persen pengeluaran pemerintah maka akan berpengaruh positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,563 persen dengan asumsi variabel investasi dan tenaga kerja dianggap konstan. Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Keynes, pengeluaran pemerintah akan berdampak terhadap ekonomi dalam negeri. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2013) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Merri Anitasari, (2015) didapat bahwa dalam menjelaskan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu digunakan alat analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS 16. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu. Adapun persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = 4,893 + 1,174x$. Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi 1,174 dengan tanda positif. Hal ini menunjukkan bila semakin tinggi pengeluaran pemerintah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran tentang pertumbuhan ekonomi tersebut, maka dalam penelitian ini akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, tenaga kerja, dan belanja negara berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2000-2021.
2. Diduga tenaga kerja sebagai variabel moderasi dapat mendorong penanaman modal dalam negeri untuk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonmmomi Indonesia tahun 2000-2021.

3. Diduga secara bersama sama penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, tenaga kerja, dan belanja negara berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2000-2021.